

**REKAPITULASI
DAFTAR RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU DALAM
KEANGGOTAAN DPR RI PERIODE 2014-2019**

Per 26 September 2019

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---|---|--|---|
| | PROLEGNAS 2015-2019 | 1 (satu) RUU | 1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.(usulan DPR) | 1. UU Nomor 42 Tahun 2014 ttg Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD. |
| I. | <p>PROLEGNAS TAHUN 2015. (40 RUU)</p> <p><u>Catatan:</u> Pd MP. IV 2014-2015 ada penambahan 2 RUU dan pergantian 2 RUU. Pada MP. II 2015-2016 ada penambahan 1 RUU dan pengalihan usul 1 RUU.</p> | 3 (tiga) RUU | <p>1. RUU ttg Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. (usulan DPR)</p> <p>2. RUU tentang Atas UU No.2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (usulan DPR)</p> <p>3. RUU ttg Penjaminan. (usulan DPR)</p> | <p>1. UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.</p> <p>2. UU Nomor 9 Tahun 2015 ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. UU Nomor 1 Tahun 2016 ttg Penjaminan.</p> |
| | | 14 (empat belas) RUU KUMULATIF TERBUKA. | <p>1. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi UU.</p> <p>2. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun</p> | <p>1. UU Nomor 1 tahun 2015 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi UU.</p> <p>2. UU Nomor 2 Tahun 2015 ttg Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU</p> |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---------|----------|---|--|
| | | | <p>2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU.</p> <p>3. RUU ttg Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Republik Sosialis Vietnam (<i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of vietnam</i>) menjadi UU.</p> <p>4. RUU ttg Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Papua Nugini (<i>Extradition Treaty between the Republic of indonesia and the Independent State of Papua New Guinea</i>) menjadi UU.</p> <p>5. RUU ttg Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Demokratik Timor Leste ttg Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan menjadi UU.</p> <p>6. RUU ttg Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Pakistan ttg Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan menjadi UU.</p> <p>7. RUU ttg Perubahan APBN Tahun Anggaran 2015.</p> <p>8. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 ttg Perubahan atas UU Nomor 30</p> | <p>Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU.</p> |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---------|----------|---|----|
| | | | <p>Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU.</p> <p>9. RUU tentang Pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).</p> <p>10. RUU ttg Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.</p> <p>11. RUU ttg Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara RI dan Republik Sosialis Vietnam (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam</i>).</p> <p>12. RUU ttg APBN Tahun Anggaran 2016.</p> <p>13. RUU ttg Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia ttg Kerjasama di Bidang Pertahanan. (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Cooperatian in the Field of Defence</i>)</p> <p>14. RUU ttg Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara</p> | |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|--|-------------------|---|--|
| | | | <p>Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Socialist Vietnam tentang Peningkatan Kerjasama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan di Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities</i>).</p> | |
| II. | <p>PROLEGNAS TAHUN 2016. (40 RUU) +(10)+(1)</p> <p><u>Catatan:</u> Pd MP. V 2015-2016 ada penambahan 10 (sepuluh) RUU</p> <p>Pada. MP II 2016-2017 ada penambahan 1 (satu) RUU</p> | 10 (sepuluh) RUU. | <ol style="list-style-type: none"> 1. RUU ttg Tabungan Perumahan Rakyat. (usulan DPR) 2. RUU ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. (usulan DPR) 3. RUU ttg Penyandang Disabilitas. (usulan DPR) 4. RUU ttg Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan/PPKSK. (usulan Pemth) 5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. 2. UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. 3. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 4. UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 5. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---------|---|---|--|
| | | | <p>Walikota menjadi Undang-Undang. (usulan Pemth)</p> <p>6. RUU tentang Pengampunan Pajak. (usulan Pemth)</p> <p>7. RUU tentang Paten. (usulan Pemth)</p> <p>8. RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis (usulan Pemth)</p> <p>9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (usulan Pemth)</p> <p>10. RUU tentang Jasa Konstruksi (usulan DPR)</p> | <p>Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.</p> <p>6. UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak</p> <p>7. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>8. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</p> <p>9. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>10. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi</p> |
| | | <p>9 (sembilan) RUU. KUMULATIF TERBUKA.</p> | <p>1. RUU ttg Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC ttg Kerjasama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan. (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cooperation Activities in the Field of Defence</i>).</p> <p>2. RUU ttg Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik</p> | |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---------|----------|--|----|
| | | | <p>Federasi Jerman mengenai Kerjasama di Bidang Pertahanan. <i>(Memorandum of understanding (MoU) between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning Cooperation in the Field of Defence)</i></p> <p>3. RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.</p> <p>4. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015.</p> <p>5. RUU tentang Pengesahan <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2016)</p> <p>6. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak.</p> <p>7. RUU tentang Pengesahan <i>Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB</p> | |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|------|--|--|---|--|
| | | | <p>mengenai Perubahan Iklim</p> <p>8. RUU tentang APBN Tahun 2017</p> <p>9. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore</i>)</p> | |
| III. | <p>PROLEGNAS TAHUN 2017. (49 RUU)+(3)</p> <p>Catatan: Pada MP I 2017-2018, Rapur Tgl 13 September 2017 disetujui penambahan 3 RUU dalam Prolegnas 2017 dan 2 RUU dalam long list: 1. RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial menggantikan RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2. RUU tentang</p> | <p>6 (enam) RUU.</p> <hr/> <p>11 (sebelas) RUU</p> | <p>1. RUU tentang Sistem Perbukuan (usul DPR)</p> <p>2. RUU tentang Pemajuan Kebudayaan (usul DPR)</p> <p>3. RUU tentang Arsitek (usul DPR)</p> <p>4. RUU tentang Pemilihan Umum (usul Pemth)</p> <p>5. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri <i>menjadi</i> RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (usul DPR)</p> <p>6. RUU tentang Kepalangmerahan (usul Pemth)</p> <hr/> <p>1. RUU tentang Pengesahan</p> | <p>1. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.</p> <p>2. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>3. UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.</p> <p>4. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p> <p>5. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>6. UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.</p> |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---|---------------------------|---|----|
| | <p>Sumber Daya Air</p> <p>3. RUU tentang RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik</p> <p>4. RUU tentang Konsultan Pajak</p> <p>5. RUU tentang Permusikan masuk dalam Long List 2015-2019</p> <p>6. RUU tentang Hak atas Tanah Adat masuk dalam long list 2015-2019</p> | <p>KUMULATIF TERBUKA.</p> | <p>Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014.</p> <p>2. RUU tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017.</p> <p>3. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016</p> <p>4. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang</p> <p>5. RUU tentang Pengesahan <i>Minamata Convention on Mercury</i> (Konvensi Minamata mengenai Merkuri).</p> <p>6. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.</p> <p>7. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat</p> | |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|--|--------------|---|--|
| | | | <p>China tentang Ekstradisi.</p> <p>8. RUU tentang Pengesahan <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)</p> <p>9. RUU tentang Pengesahan <i>Protocol Amending Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization</i> (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).</p> <p>10. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.</p> <p>11. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.</p> | |
| IV. | PROLEGNAS TAHUN 2018. (50 RUU – 1 RUU = 49 RUU) <u>Catatan:</u> | 5 (lima) RUU | 1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.(Usul DPR) 2. RUU tentang | 1. UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---|--|---|--|
| | <p>RUU tentang Kepalangmerahan masuk dalam Daftar Prolegnas 2018 yang disahkan dalam Rapur Tgl 5 Desember 2017, namun pada Tgl 11 Desember 2017 disahkan menjadi UU</p> | | <p>Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. (Usul Pemth)</p> <p>3. RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Usul Pemth)</p> <p>4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Usul Pemth)</p> <p>5. RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Usul DPR)</p> | <p>2. UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.</p> <p>3. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan</p> <p>4. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>5. UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.</p> |
| | | <p>10 (sepuluh) RUU KUMULATIF TERBUKA.</p> | <p>1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence</i>)</p> <p>2. RUU tentang Pengesahan <i>Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on</i></p> | |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---------|----------|--|----|
| | | | <p><i>Financial Services under the ASEAN Framework Agreement of Services</i> (Protokol untuk melaksanakan Paket Komitmen Keenam di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)</p> <p>3. RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan <i>(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the field of Defence).</i></p> <p>4. RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2017</p> <p>5. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi <i>(Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia)</i></p> <p>6. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian</p> | |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---------|----------|---|----|
| | | | <p>Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan. <i>(Memorandum of understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and Teh Ministry of Defence of The Kingdom of The Netherlands Defence Related Cooperation)</i></p> <p>7. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan</p> <p>8. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan</p> <p>9. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi <i>(Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Eirates on Extradition)</i></p> <p>10. RUU tentang APBN</p> | |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---|--------------------|--|---|
| | | | 2019 beserta Nota Keuangannya (disahkan Tgl 31 Okt 2018). | |
| V. | <p>PROLEGNAS TAHUN 2019. (55 RUU – 1 RUU = 54 RUU)</p> <p>Catatan:</p> <p>RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam masuk dalam Daftar Prolegnas 2019 yang disahkan dalam Rapur Tgl 31 Oktober 2018, namun pada Tgl 3 Desember 2018 disahkan menjadi UU</p> | 12 (dua belas) RUU | <ol style="list-style-type: none"> 1. RUU tentang Kebidanan (Usul DPR) 2. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Usul DPR) 3. RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Usul Pemth) 4. RUU tentang Pekerja Sosial (Usul DPR) 5. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (Usul DPR) 6. RUU tentang Sumber Daya Air (Usul DPR) 7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Usul DPR) 8. RUU tentang Karantina Hewan, | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 2. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 3. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 4. Disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR tanggal 3 September 2019. Menunggu Penomoran. 5. Disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR tanggal 16 September 2019. Menunggu Penomoran. 6. Disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR tanggal 24 September 2019. Menunggu Penomoran. 7. Disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR tanggal 24 September 2019. Menunggu Penomoran. 8. Disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---------|---|--|--|
| | | | <p>Ikan, dan Tumbuhan. (Usul DPR)</p> <p>9. RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. (Usul DPR)</p> <p>10. RUU tentang Pesantren* (Usul DPR)</p> <p><i>Catatan : Judul dalam Prolegnas Prioritas RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.</i></p> <p>11. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara (Usul Pemerintah)</p> <p>12. RUU tentang Ekonomi Kreatif (Usul DPD)</p> | <p>DPR tanggal 24 September 2019. Menunggu Penomoran.</p> <p>9. Disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR tanggal 24 September 2019. Menunggu Penomoran.</p> <p>10. Disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR tanggal 24 September 2019. Menunggu Penomoran.</p> <p>11. Disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR tanggal 26 September 2019. Menunggu Penomoran.</p> <p>12. Disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR tanggal 26 September 2019. Menunggu Penomoran</p> |
| | | <p>9 (sembilan) RUU KUMULATIF TERBUKA</p> | <p>1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerjasama Industri Pertahanan. <i>(Agreement between the Government of the</i></p> | <p>1. Di sahkan menjadi UU pada rapat Paripurna DPR tanggal 13 Februari 2019.</p> |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|-----|---------|----------|---|---|
| | | | <p><i>Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Industry Cooperation)</i></p> <p>2. RUU tentang Pengeesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, <i>(Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between teh Republic of Indonesia and the United Arab Emirates)</i></p> <p>3. RUU Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan <i>(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the field of Defence).</i></p> <p>4. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi <i>(Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal</i></p> | <p>2. Di sahkan menjadi UU pada rapat Paripurna DPR tanggal 13 Februari 2019.</p> <p>3. Di sahkan menjadi UU pada rapat Paripurna DPR tanggal 28 Maret 2019.</p> <p>4. Di sahkan menjadi UU pada rapat Paripurna DPR tanggal 4 Juli 2019.</p> |

| NO. | PROGRAM | DISAHKAN | JUDUL RUU | UU |
|---------------|---------|---------------------------------|--|--|
| | | | <p><i>Assistance Extradition</i>)</p> <p>5. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance Matters</i>)</p> <p>6. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018</p> <p>7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p> <p>8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Usul DPR)</p> <p>9. RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta nota keuangannya.</p> | <p>5. Di sahkan menjadi UU pada rapat Paripurna DPR tanggal 4 Juli 2019.</p> <p>6. Di sahkan menjadi UU pada rapat Paripurna DPR tanggal 20 Agustus 2019.</p> <p>7. Di sahkan menjadi UU pada rapat Paripurna DPR tanggal 16 September 2019.</p> <p>8. Di sahkan menjadi UU pada rapat Paripurna DPR tanggal 17 September 2019.</p> <p>9. Di sahkan menjadi UU pada rapat Paripurna DPR tanggal 24 September 2019.</p> |
| JUMLAH | | 90 (SEMBILAN PULUH) RUU. | 37 (TIGA PULUH TUJUH) RUU 53 (LIMA PULUH EMPAT) RUU KUMULATIF TERBUKA | |

JAKARTA, 26 September 2019
SET. BADAN LEGISLASI DPR RI